



Dr. Nursapia Harahap, MA

KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN AGAMA

Editor:
Dr. Jamiluddin Marpaung, MA

KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN AGAMA

Penulis:
Dr. Nursapia Harahap, MA



CV. Dalni Bintang

Komunikasi Politik, Demokrasi, dan Agama

Penulis : Dr. Nursapia Harahap, MA

ISBN : 978-623-88583-3-0

Editor : Dr. Jamiluddin Marpaung, MA

Cetakan pertama, Agustus 2023

Penerbit CV. Dalni Bintang

Anggota IKAPI Nomor:013/RAU/2022

Alamat:

Jl. Cempaka Petakur Atas, Suka Damai

Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu

Provinsi Riau, 28454

<https://penerbitdalnibintang.com/>

dalnibintang20@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ketentuan pidana Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya hingga penulisan buku Komunikasi Politik, Demokrasi Dan Agama ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih kepada Ayahanda Alm. Haban Harahap dan Ibunda tercinta Hj. Nurhamida Siagian yang telah membesarkan dan memperjuangkan hingga menyelesaikan Pendidikan yang ditempuh. Disamping itu juga penulis berterimakasih kepada rekan-rekan yang memberi dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku terlebih kepada anak-anak penulis yang memberi dorongan yang luar biasa untuk kemajuan penulis di bidang akademisi.

Buku ini mengkaji tentang komunikasi politik dan relasi antara legislatif, eksekutif dan lembaga agama dalam peningkatan pembangunan keagamaan. Pembahasan dalam buku ini merupakan kajian praktis yang terjadi di kalangan eksekutif, legislative dalam menyikapi kebutuhan Lembaga agama. Disamping itu juga di bahas masalah komunikasi politik dalam pandangan Islam serta teori komunikasi yang berkaitan dengan relasi politik dan keagamaan serta hasil-hasil penelitian yang di kutip dari jurnal-jurnal bereputasi internasional dan nasional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, karena itu penulis berharap kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan ini. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam memperkaya khazanah keilmuan.

Medan, 12 Agustus 2023

Penulis,

Prof. Dr. Nurhayati, MA.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. DEMOKRASI INDONESIA	1
B. PEMAHAMAN DASAR KOMUNIKASI POLITIK	3
BAB II	8
KOMUNIKASI POLITIK	8
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Komunikasi	8
1. Pengertian Komunikasi	8
2. Hakikat dan Tujuan Komunikasi	13
3. Fungsi dan Unsur Komunikasi	14
4. Prinsip-Prinsip Komunikasi	17
6. Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Islam	20
7. Komunikasi Islam Menurut Tinjauan Al-Quran	28
B. Politik	41
1. Pengertian Politik	41
2. Pengertian Komunikasi Politik	43
3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Politik Islam	64
BAB III	67
TEORI KOMUNIKASI POLITIK	67
A. Teori Dialektika Relasional	67

B. Komunikasi Politik Eksekutif Dan Legislatif Dan	69
Lembaga Agama.....	69
BAB IV.....	89
CONTOH ARTIKEL KOMUNIKASI POLITIK	89
BEREPUTASI INTERNATIONAL DAN NASIONAL	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. DEMOKRASI INDONESIA

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang menjadi *role model* bagi negara-negara di dunia dalam pelaksanaan demokrasi.¹ Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai pemerintahan yang dari, oleh dan untuk rakyat dengan memposisikan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Sistem demokrasi ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pikiran.²

Untuk menjalankan sistem demokrasi Pancasila ini bangsa Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai referensi utama yang secara tegas mengatur sistem pemerintahan yang demokrasi. Dalam UUD 1945 diakui adanya kebebasan dan persamaan hak bagi setiap warga Indonesia, yang kemudian menjadi seperangkat hak dan kewajiban warga negara.³ Hak dan kewajiban warga negara ini dilindungi oleh undang-undang yang secara jelas mengatur tentang status dan kedudukan warga negara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia mencerminkan suatu kesatuan demokrasi yang dijalankan atas kepentingan warga negaranya hingga saat ini lahirlah reformasi. Reformasi adalah jawaban atas kebebasan bangsa Indonesia untuk berkiprah dan menentukan perjalanan hidupnya.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun struktur pemerintahan dan birokrasi daerah yang sesuai dengan kemampuan dan

¹Azyumardi Azra, *Addressing Challenges of Radical Islam: Some Indonesian Lesson to Learn*, Hans Kochler, ed., *The "Global War on Terror" and the Question of World Order*, (Vienna: International Progress Organization, 2008), h. 201.

² Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28.

³ UUD 1945, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan lainnya.

kebutuhannya. Karena itu undang-undang ini memberi kelonggaran kepada daerah untuk memiliki struktur pemerintahan dan birokrasinya sendiri-sendiri. Pembentukan dan pengelolaan kelembagaan pemerintah daerah sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.

Undang-undang itu juga memberi kewenangan pada daerah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan daerah. Dengan demikian, diharapkan program dan kebijakan pembangunan daerah nantinya akan menjadi lebih responsif dan efektif. Undang-undang ini juga memberi daerah kewenangan untuk mengangkat, menempatkan, dan mengembangkan aparatur daerah. Daerah juga diberi kewenangan untuk menentukan sistem intensif dan kesejahteraan aparaturnya sesuai dengan kemampuan keuangannya. Namun pelaksanaan otonomi daerah itu bisa melahirkan potensial problem yang kalau tidak diantisipasi dengan baik bisa menciptakan persoalan-persoalan baru yang tidak diinginkan. Ketimpangan antara daerah merupakan salah satu persoalan yang akan muncul, kemudian juga kecenderungan munculnya pejabat politik aparatur daerah yang dalam hal ini kontrol pusat semakin terbatas dapat mengakibatkan lambannya pergerakan pembangunan di daerah.

Dalam konteks ini, peran elit lokal sangat diharapkan dapat memainkan peran pemberdayaan semua ini. Membangun komunikasi dengan para elit politik dan lembaga-lembaga yang dianggap berkompeten termasuk lembaga agama dalam peningkatan pembangunan kedaerahan harus dilakukan oleh pejabat politis. Agenda politik pada era reformasi ditandai dengan menguatnya demokratisasi dan transparansi dalam semua tataran penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dengan menerapkan asas desentralisasi sebagai jawaban atas demokratisasi dan transparansi.

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang penyeimbangan keuangan daerah merupakan dasar lahirnya otonomi daerah, di mana kepala daerah berhak mengatur anggaran daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kepentingan rakyat. Untuk menjalankan sistem otonomi daerah, gubernur dan DPRD harus membangun komunikasi politik yang baik

agar apa yang diinginkan masyarakat dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

B. PEMAHAMAN DASAR KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi politik pada dasarnya diartikan sebagai proses berjalannya hubungan antara lembaga-lembaga dalam sistem politik nasional dan hubungan lembaga-lembaga dengan masyarakat sehingga terjadi pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan.⁴

Komunikasi politik di beberapa daerah sudah berubah arah, dimana komunikasi politik dijadikan sebagai ajang saling menjatuhkan satu sama lainnya. Pada beberapa kasus anggota DPRD menjadi tersangka karena salah memanfaatkan kewenangannya, pada kasus lain kepala daerah diberhentikan oleh DPRD dan ironisnya lagi DPRD dan kepala daerah bersama-sama menyalahgunakan jabatannya. Inilah kenyataan betapa peliknya persoalan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif.

Struktur pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila sebagaimana yang dimuat dalam UUD 1945 disebutkan bahwa struktur pemerintahan terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pelaksana pemerintahan.⁵ Ketiga struktur tersebut menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam upaya pencapaian dan mewujudkan kepentingan rakyat. Eksekutif dalam hal ini terdiri atas presiden, wakil presiden dan menteri yang bertugas menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang yang didasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem demokrasi yang dalam hal ini diwakili Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), demikian juga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pelindung negara berfungsi untuk mempertahankan undang-undang supaya sesuai

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 289.

⁵A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 9.

dengan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut.⁶

Dalam konteks yang lebih praktis di daerah, struktur pemerintahan juga mengacu pada apa yang dikemukakan bahwa eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pemerintah. Struktur pemerintah yang sama juga berlaku berdasarkan status dan fungsi masing-masing, yaitu gubernur dan wakil gubernur merupakan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif yang memiliki tugas dan fungsi menetapkan rancangan pembangunan di daerah yang kita sebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan lembaga agama dapat berlangsung baik jika didukung situasi dan suasana yang harmonis. Untuk menciptakan keharmonisan dalam sebuah komunikasi harus ada kepercayaan dan kejujuran serta keterbukaan yang tinggi. Sikap seperti ini harus terbangun di kalangan eksekutif, legislatif dan lembaga agama terutama dalam proses rencana pembangunan lima tahun ke depan. Menurut Nitin Bhatnagar dan Mamta Bhatnagar:

*“communication climate an organization’s or educational. They encourage openness and honesty, and their employees feel free to confess their mistakes, to disagree with the superiors, ethical people are generally trustworthy, fair and impartial, respecting the rights of others and concerned about the impact of their actions on society.”*⁷ (Iklim komunikasi harus terbuka dalam sebuah organisasi atau pendidikan. Mereka mendorong keterbukaan dan kejujuran, dan karyawan mereka merasa bebas untuk mengakui kesalahan mereka, tidak setuju pada atasan jika perintahnya salah. Secara umum orang dapat dipercaya, adil dan tidak memihak, menghormati hak orang lain dan khawatir dampak dari tindakan mereka pada masyarakat).

Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya gubernur

⁶Riri Nazriyah, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, (Yogyakarta: UII, 2007), h. 44.

⁷Nitin Bhatnagar dan Mamta Bhatnagar, *Effective Communication and Soft Skill Strategi for Succes*, (New Delhi: Dorling Kindersley, 2012), h. 364.

sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif merupakan dua struktur yang paling menentukan sebuah pembangunan di daerah, sebab gubernur sebagai pelaksana pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak dapat memisahkan diri dari DPRD sebagai lembaga yang berwenang menetapkan anggaran daerah. Oleh sebab itu, kedua struktur pemerintahan ini tentunya merupakan kelompok yang paling banyak berkomunikasi, baik dalam bentuk komunikasi internal ataupun eksternal, maka tentu kedua lembaga ini sangat menentukan bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan dan dijalankan sepenuhnya.

Sebagai sebuah lembaga yang berbeda tentunya kecenderungan masing-masing sangat menentukan bagaimana sebuah produk kebijakan dilakukan. Oleh sebab itu, antara kedua lembaga ini harus selalu terjalin hubungan yang baik untuk mewujudkan terciptanya tujuan pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Secara khusus hubungan kedua lembaga ini tentu saja dipahami sebagai bentuk hubungan politik dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, sebab dalam hal ini tentu saja komunikasi politik yang terbangun antar kedua lembaga negara ini sangat menentukan bagaimana upaya perwujudan untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Di samping komunikasi eksekutif dan legislatif, lembaga agama juga harus membangun komunikasi terhadap kedua lembaga di atas. Tugas lembaga agama adalah membentuk spritual manusia ke arah yang lebih baik, membimbing masyarakat untuk memiliki sikap dan etika yang baik di semua kehidupan, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berpolitik dan bernegara. Apalagi dilihat dari kondisi masyarakat hari ini di mana dekadensi moral telah terjadi, baik di kalangan aparatur negara, tokoh politik bahkan di kalangan akademisi hal itupun terjadi.

Lembaga agama adalah mitra pemerintah dalam perbaikan umat. Sudah sepantasnya lembaga-lembaga agama mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam rangka membangun sikap beragama, membangun mental dan kepribadian umat supaya ikut bersama membangun, menjaga dan melestarikan pembangunan. Munculnya miskomunikasi antar umat beragama diawali oleh persepsi terhadap penilaian agama yang berbeda dalam masyarakat. Jika hubungan

beragama tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman laten bagi sistem pemerintahan di Indonesia.

Persoalan yang paling banyak dihadapi adalah sikap tidak peduli masyarakat atas pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah. Sikap tidak peduli adalah hal yang urgen yang perlu dicari solusinya. Dalam persoalan yang sangat urgen ini sudah seharusnya lembaga agama dilibatkan dalam perencanaan pembangunan keagamaan mulai dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan sampai di tingkat provinsi. Sampai penetapan RAPBN dan RAPBD hal ini belum terwujud sepenuhnya. Untuk itu, apabila komunikasi politik keduanya terjalin secara baik, maka tentu dapat dipastikan kinerja dari kedua lembaga ini juga akan berjalan secara baik pula. Demikian juga sebaliknya, apabila komunikasi politik keduanya tidak sesuai sebagaimana mestinya, tentu dapat dipastikan akan memberi inflikasi pada upaya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Dari data di atas sudah seharusnya posisi kelembagaan Islam itu mendapat prioritas dalam pembangunan, khususnya pembangunan keagamaan apalagi ditopang oleh eksekutifnya mayoritas muslim, baik gubernur maupun sekretaris daerah. Ternyata identitas yang ada bukan ukuran bagi kita mendapat perhatian yang lebih. Lembaga agama dalam memperoleh bantuan pembangunan tidak sebanding angkanya dengan bantuan pembangunan kepada lembaga yang lainnya, tentu ini tidak terlepas dari komunikasi politik yang dibangun. Lantas bagaimana komunikasi politik yang dibangun lembaga keagamaan dengan eksekutif dan legislatif. Inilah yang perlu dikaji dalam penelitian ini secara mendalam sehingga pembangunan keagamaan ke depan menjadi prioritas utama, juga merupakan bagian penting dan integral dalam upaya pembangunan nasional, sebab agama tidak hanya menjadi hal yang menjadi urusan kepentingan masyarakat, tetapi juga negara yang merupakan bentuk refleksi atas pengamalan Pancasila, sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Sejauh ini ada kesan yang muncul di kalangan masyarakat bahwa pembangunan tidak merata dan tidak berkeadilan baik dari segi jumlah dana yang diberikan maupun jumlah lembaga penerima bantuan sangat berbeda terutama pada lembaga-lembaga agama, baik yang di tingkat

kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Standar operasional pelaksanaan penyaluran bantuan yang tidak jelas, tidak adanya kriteria penerima bantuan yang ditetapkan serta tidak dilakukannya survey kepada lembaga-lembaga yang diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, sehingga terkesan tercipta polarisasi di kalangan eksekutif dan legislatif dalam menetapkan rancangan pembangunan khususnya bantuan kepada lembaga agama. Tidak hanya itu, angka pengusulan yang ditawarkan cukup pantastis di antara lembaga yang ada, akan tetapi justru bantuan yang bermuatan pembangunan keagamaan yang banyak menghadapi masalah baik organisasi keagamaan, pendidikan dan khususnya rumah ibadah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang terputus antara eksekutif legislatif dan lembaga agama dalam rangka peningkatan pembangunan keagamaan.

BAB II

KOMUNIKASI POLITIK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Setiap manusia sangat membutuhkan komunikasi dalam rangka memenuhi seluruh aspek kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani harus dilakukan dengan proses komunikasi. Untuk mengekspresikan diri, membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadian manusia selalu melakukan komunikasi dengan orang lain.

Sejak manusia diciptakan sebagai makhluk sosial maka dia mempunyai tujuan dan ambisi hidup. Dia mulai berhadapan dengan kebutuhan untuk berhubungan satu sama lain, dan di dalam tatanan hubungan itulah manusia selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhannya serta lingkungan dengan berbagai cara.

Komunikasi adalah kebutuhan yang urgen bagi manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang ingin selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Tangisan manusia sejak lahir merupakan awal komunikasi yang dibangun dengan lingkungan khususnya ibu. Jika bayi menangis ada pesan yang terkandung kalau bayi sudah lapar atau basah. Bayi dapat berbicara karena mendengar suara dari lingkungan sekitar. Manusia yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia lainnya tidak akan mampu berbicara seperti bahasa manusia. Kisah nyata terjadi pada satu rumah tangga yang dikutip dalam buku psikologi komunikasi.

Pada tahun 1970, di California, seorang ibu berusia 50 tahun melarikan diri dari rumahnya setelah bertengkar dengan suaminya yang berusia 70 tahun. Ia membawa anak gadisnya yang berusia 13 tahun. Mereka datang meminta bantuan pada petugas kesejahteraan sosial. Tetapi petugas melihat hal aneh pada anak gadis yang dibawanya. Perilakunya tidak menunjukkan anak yang normal. Tubuhnya bungkuk, kurus kering, kotor, dan menyedihkan. Sepanjang saat ia tidak henti-hentinya meludah. Tidak satu saat pun terdengar bicara. Petugas

mengira gadis ini telah dianiaya ibunya. Polisi dipanggil, dan kedua orang tuanya harus berurusan dengan pengadilan. Pada hari sidang, ayah itu membunuh dirinya dengan pistol. Ia meninggalkan catatan, “Dunia tidak akan pernah mengerti”. Mungkin ia benar, dunia tidak akan mengerti bagaimana mungkin seorang ayah dapat membenci anaknya begitu sangat. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa Genie, demikian nama samaran gadis tersebut, melewati masa kecilnya di neraka yang dibuat ayahnya sendiri. Sejak kecil ayahnya mengikat Genie dalam sebuah tempat duduk yang ketat. Sepanjang hari ia tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Malam hari ia ditempatkan dalam semacam kurungan dari besi. Seringkali ia kelaparan. Kalau Genie menangis, ayahnya memukulinya. Si ayah tidak pernah bicara, si ibu terlalu tua untuk mengurusnya. Kakak laki-laki Genie-lah akhirnya yang berusaha memberi makan dan minum. Itupun sesuai dengan perintah ayahnya, harus dilakukan diam-diam, tanpa mengeluarkan suara. Genie tidak pernah mendengar orang bercakap-cakap. Kakak dan ibunya sering mengobrol dengan berbisik karena takut pada ayahnya.

Ketika Genie masuk rumah sakit, ia tidak diketahui apakah dapat berbicara atau mengerti pembicaraan orang. Ia membisu, kepandaianya tidak berbeda dengan anak yang berusia satu tahun. Dunia mungkin tidak akan pernah mengerti, tetapi ditemukannya Genie telah mengundang rasa ingin tahu psikolog, linguist, neurolog, dan mereka yang mempelajari perkembangan otak manusia. Genie adalah contoh yang langka tentang seorang anak manusia yang sejak kecil hampir tidak pernah memperoleh kesempatan berkomunikasi. Penemuan Genie menarik perhatian, Genie tidak dibekali keterampilan mengungkapkan pikirannya dalam bentuk lambang-lambang yang dipahami orang lain. Apakah kurangnya keterampilan ini menghambat perkembangan mental lainnya? Apakah sel otak mengalami keterlambatan pertumbuhan? Apakah seluruh sistem kognitifnya menjadi lumpuh? Inilah di antara sekian banyak pertanyaan yang menyebabkan Susan Curtis, profesor linguistik di University of California, mencurahkan waktu tujuh tahun untuk meneliti Genie.⁸

⁸Pines. M. *The Cicilizing Of Genie, Pschology To Day*. Premack, A.J dan D. Premack, 1981. h. 28-34.

BAB III

TEORI KOMUNIKASI POLITIK

A. Teori Dialektika Relasional

Komunikasi Dan Interaksi Merupakan Kebutuhan Manusia Dalam Kehidupan Sehari-Harinya Baik Di Lembaga Pemerintahan Maupun Di Lembaga Legislatif Dan Juga Lembaga Agama. Para Wakil Rakyat Dan Juga Birokrat Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Tertentu Senantiasa Menggunakan Komunikasi, Terutama Dalam Menyampaikan Rekomendasi Terhadap Kebijakan Yang Akan Diterapkan. Begitu Pula Para Penguasa Atau Pemerintah Dalam Menentukan *Publicy Policy* Akan Menganalisis Terlebih Dahulu Berbagai Informasi Yang Berasal Dari Masyarakat, Demikian Juga Para Legislator Dalam Hal Membahas Suatu Produk Hukum Sangat Memerlukan Komunikasi Terlebih Dahulu Dengan Segala Komponen Yang Terkait Dengan Produk Legislatif tersebut.

Singkatnya Komunikasi Mempunyai Peranan Yang Cukup Penting Dalam Proses Politik. Oleh Karena Itu, Tidak Jarang Para Penguasa Berusaha Untuk Mengendalikan Atau Mengawasi “Komunikasi” Agar Mereka Tetap Mendapat Dukungan Untuk Berkuasa Secara Terus Menerus. Seorang Pemimpin Politik Baik Yang Otoriter Maupun Yang Demokrat, Ada Kecenderungan Untuk Membangun Hubungan Dan Komunikasi Dengan Kelompok Lain Agar Tetap Eksis Dalam Berkiprah Untuk Mencapai Tujuan Yang Diinginkan Dan Juga Tetap Menguasai Informasi Agar Bisa Mempertahankan Kekuatan Kelompoknya.

Pada Dasarnya Setiap Orang Berhak Menjadi Komunikator Politik, Hanya Saja Yang Membedakan Adalah Kemampuan Menguasai Sasaran. Ada Dua Kategori Komunikator Politik Menurut Daniel Katz, Yaitu Ada Yang Disebut Dengan Partisipan Dan Juga Ideologi.⁷⁷ Partisipan Adalah Mereka Yang Mengidentifikasi Diri Sebagai Wakil Kelompok, Lebih Banyak Melindungi Dan Mengutamakan Kepentingan Kelompok Atau Pribadi. Orang Seperti Ini Juga Mempengaruhi Orang Dengan Cara Menciptakan Situasi Yang Saling Menguntungkan Kedua Belah Pihak

⁷⁷ Budiardjo, *Dasar-Dasar*, h.24.

Dengan Cara Tawar Menawar Atau Lobi Dengan Cara *Bargaining*. Komunikator Ideologi Adalah Mereka Yang Berorientasi Pada Pengambilan Keputusan Dan Memperjuangkan Nilai-Nilai Ideologinya, Tetap Mempertahankan Pendapatnya.

Ada Beberapa Asumsi Tentang *Relational Dialectics Theory*, Yaitu *Relationships Not Linear, Relational Life Is Characterized By Change, Contradiction Is The Fundamental Fact Relational Life Communication Is Central To Organizing And Negotiating Relational*.⁷⁸ Sebuah Teori Komunikasi Yang Berpandangan: Simpul Kontradiksi Dalam Hubungan Pribadi Atau Interaksi Terus Menerus Antara Kebalikan Atau Kecenderungan Untuk Menentang. Teori Ini, Pertama Kali Diusulkan Masing-Masing Oleh Leslie Baxter Dan WK Rawlins Pada Tahun 1988, Mendefinisikan Pola Komunikasi Antara Mitra Hubungan Sebagai Akibat Dari Ketegangan *Dialektis Endemik*. Yang Mengatakan Bahwa Hidup Berhubungan Dicitrakan Oleh Ketegangan-Ketegangan Atau Konflik Antara Individu. Konflik Tersebut Terjadi Ketika Seseorang Mencoba Memaksakan Keinginannya Satu Terhadap Yang Lain.⁷⁹

Dialektika Relasional Merupakan Penjabaran Ide Bahwa Hidup Adalah Sebuah Tempat Yang Menangani Pertentangan Dan Tekanan Di Antara Kekuatan Yang Berlawanan Dalam Suatu Sistem.⁸⁰ Manusia Mengalami Tabrakan Antara Menentang Keinginan Dan Kebutuhan Dalam Komunikasi Relasional. Baxter Dalam *Teori Dialektis* Yang Mengingatkan Kita Bahwa Hubungan Yang Terus Berubah, Dan Bahwa Hubungan Yang Sukses Dan Memuaskan Membutuhkan Perhatian Konstan. Deskripsi Baxter Dari *Relation Dialectics* Adalah Dalam Kehidupan Berkomunikasi Dengan Orang Lain Baik Pribadi Atau Kelompok Akan Selalu Menghadapi Pertentangan. Pertentangan Dan Perlawanan Muncul Manakala Apa Yang Diinginkan Oleh Satu Orang Atau Banyak Orang Tidak Terpenuhi Oleh Pihak Lain. Sikap Tidak

⁷⁸ Richard West, Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory* (Amerika: Mcgraw-Hill, 2007), h. 224.

⁷⁹ Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h.139.

⁸⁰. Stephen W. Little John dan Karen A. Foss, Penerjemah Muhammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Humanika Salemba, 2014), h. 302.

BAB IV

CONTOH ARTIKEL KOMUNIKASI POLITIK BEREPUTASI INTERNATIONAL DAN NASIONAL

Komunikasi Politik Gerakan #2019GantiPresiden

Anang

Sujoko1

anangsujoko

@ub.ac.id

Abstract: In the 2019 general election, social media became an important part in building a political image as well as a channel for political communication. One of the opposition movements against the incumbent was the #2019GantiPresiden movement. The movement was a channel of political communication for people who personally wanted to have a new president. This study aimed to reveal how the #2019GantiPresiden political communication movement during 2018 and the repressive treatment experienced by them. This study used a qualitative research method of text analysis of several online media such as Twitter and micro-blogging. The results showed that the #2019GantiPresiden movement was an organic and voluntary based political communication movement. The spread of this movement was increasingly massive with the support of social media in the form of Twitter in building mass political support.

Abstrak: Pada pemilihan umum 2019, media sosial menjadi bagian penting dalam membangun citra politik sekaligus sebagai saluran komunikasi politik. Salah satu gerakan oposisi terhadap kubu incumbent, Presiden Jokowi, adalah gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan tersebut merupakan saluran komunikasi politik orang-orang yang secara pribadi ingin memiliki presiden baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana gerakan komunikasi politik #2019GantiPresiden selama 2018 dan perlakuan represif yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis teks beberapa

media online dan microblogging media Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan komunikasi politik organik yang berbasis individual dan secara sukarela. Penyebaran gerakan ini semakin massif dengan dukungan media sosial berupa twitter dalam membangun dukungan massa politik.
Kata Kunci: Komunikasi politik, media social, Pilpres 2019.

1 Dosen Universitas Brawijaya Malang

Jurnal Komunikasi Islam | ISBN 2088-6314 | Terakreditasi Menristekdikti SK. NO. 2/E/KPT/2015 | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

(UIN) Sunan Ampel Surabaya - Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia

Pendahuluan

Pembelahan masyarakat menjadi dua kelompok besar menjelang Pilpres 2019 semakin menguat. Satu kelompok berusaha menyuarakan dukungan ke Jokowi untuk dua periode dan kubu lain menilai Jokowi tidak layak untuk dipilih kembali. Hadirnya kelompok yang berseberangan dengan petahana ternyata ditanggapi negatif oleh tokoh-tokoh elit politik dan bahkan Jokowi sebagai presiden.

Meski demikian, gerakan masyarakat yang tidak setuju terhadap pencalonan kembali Jokowi menemukan saluran bersama. Saluran tersebut bernama #2019GantiPresiden yang bermuara di media maya dan gerakan kerakyatan. Hadirnya #2019GantiPresiden di media social Twitter, Facebook dan Instagram ternyata terus memasuki ranah empiris berupa deklarasi dan munculnya penguatan gerakan melalui simbol-simbol di kaos. Gerakan hashtag tersebut merupakan bentuk komunikasi politik dari pihak yang merasa dipinggirkan oleh saluran media arus utama. Sebagaimana diungkapkan oleh Gun Gun Heryanto (2018, hlm.17) bahwa salah satu faktor penting dan fundamental dalam mengelola kehidupan politik adalah komunikasi politik (Heryanto, 2018, hlm.17).

Tulisan ini berusaha menjelaskan sejumlah bentuk komunikasi politik represif terhadap gerakan organik #2019GantiPresiden. Komu-

Referensi

- Akkerman A, Mudde C and Zaslove A (2014) Seberapa populis masyarakatnya? Mengukur sikap populis pada pemilih. *Studi Politik Komparatif* 47(9): 1324–1353.
- Akkerman A, Zaslove A and Spruyt B (2017) 'We the people' or 'we the people'? Perbandingan dukungan untuk populis radikal kanan dan populis radikal kiri di Belanda. *Ulasan Ilmu Politik Swiss* 23(4): 377–403.
- Albertazzi D dan McDonnell D (2007) *Populisme Abad Dua Puluh Satu: Momok Demokrasi Eropa Barat*. Peloncat.
- Arzheimer K (2009) Faktor kontekstual dan suara ekstrem kanan di Eropa Barat, 1980-2002. *Jurnal Ilmu Politik Amerika* 53(2): 259–275.
- Arzheimer K dan Carter. E (2006) Struktur peluang politik dan kesuksesan partai ekstremis sayap kanan. *Jurnal Penelitian Politik Eropa* 45(3): 419–443.
- Barber M and Pope JC (2019) Apakah partai mengalahkan ideologi? Dis melibatkan partai dan ideologi di Amerika. *Ulasan Ilmu Politik Amerika* 113: 1–17.
- Bartels LM (2002) Di luar penghitungan berjalan: Bias partisan dalam persepsi politik. *Perilaku Politik* 24(2): 117–150.
- Bonikowski B dan Gidron N (2016) Gaya populis dalam politik Amerika: Wacana kampanye kepresidenan, 1952-1996. *Kekuatan Sosial* 94(4): 1593–1621.
- Campbell A, Converse PE, Miller WE, dkk. (1960) *Pemilih Amerika*. Chicago: Universitas Chicago Press.
- Caramani D (2017) Will vs. Reason: Bentuk representasi politik populis dan teknokratis dan kritik mereka terhadap pemerintahan partai. *Ulasan Ilmu Politik Amerika* 111(1): 54–67.
- Castanho Silva B, Jungkunz S, Helbling M, dkk. (2020) Perbandingan empiris tujuh skala sikap populis.

- Triwulanan Penelitian Politik 73(2): 409– 424.
- Erisen C, Guidi M, Martini S, dkk. (2021) Korelasi Psikologis Sikap Kerakyatan. Psikologi Politik 42: 149–171.
- Marcos-Marne H, Plaza-Colodro C and Freyburg T (2020) Siapa yang memilih partai baru? Pemungutan suara ekonomi, ideologi politik dan sikap populisMudde, Cas. 2017.” Populisme: pendekatan ideasional. Di

- dalam: *The Oxford Handbook of Populism* Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul A. Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy. Oxford University Press, Vol 43, hlm. 1– 21.
- Geurkink B, Zaslove A, Sluiter R, dkk. (2020) Sikap populis, kepercayaan politik, dan kemandirian politik eksternal: Anggur lama dalam botol baru? *Ilmu Politik* 68(1): 247–267.
- Givens TE (2004) Kesenjangan gender kanan yang radikal. *Komparatif Ilmu Politik* 37(1): 30–54.
- Golder M (2003) Menjelaskan variasi keberhasilan partai ekstrim kanan di Eropa Barat. *Studi Politik Komparatif* 36(4): 432–466.
- Hawkins KA (2009) Apakah Chavez merakyat? Mengukur wacana populis dalam perspektif komparatif. *Studi Politik Komparatif* 42(8): 1040– 1067.
- Hawkins KA dan Rovira Kaltwasser C (2017) Pendekatan ideasional terhadap populisme. *Tinjauan Penelitian Amerika Latin* 52(4): 513– 528.
- Hawkins K dan Littvay L (2019) *Populisme AS Kontemporer dalam Perspektif Komparatif*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hawkins KA, Scott R dan Mudde C. 2012. “Mengukur populis sikap.” Hawkins K, Baca M dan Pauwels T (2017) “Populisme dan penyebabnya.” Di dalam: *Oxford Handbook of populism* Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul A Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy. Oxford, Inggris: Oxford University Press, hlm. 267–286.
- Hawkins KA, Aguilar R, BrunoSilva C, wasser Cristóbal Rovira Kalt, dkk. (2019) Mengukur Wacana Populis: Basis Data Populisme Global. Dalam: Dipresentasikan pada Konferensi Tahunan EPSA 2019 di Belfast. Reino UnidoJuni.
- Hawkins KA, Rovira Kaltwasser C and Andreadis I (2020) *Aktivasi Sikap Kerakyatan. Pemerintah dan Oposisi*

- 55(2): 283–307.
- Hieda T, Zenkyo M and Nishikawa M (2021) Apakah populis mendukung populisme? Pemeriksaan melalui survei online setelah pemilihan Tokyo Metropolitan Assembly 2017. *Politik Partai* 27(2): 317–328.
- Hunger S dan Paxton F (2021) Apa kata kuncinya? Tinjauan tematis tentang keadaan penelitian populisme dalam ilmu politik. *Penelitian dan Metode Ilmu Politik* 10: 1–17.
- Imbens Guido W dan Rubin DB (2015) *Inferensi Kausal dalam Ilmu Statistik, Sosial, dan Biomedis: Sebuah Pengantar*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ivaldi G, Lanzone ME and Woods D (2017) Varietas Populisme dalam spektrum kiri-kanan: Kasus front nasional, liga utara, podemos, dan pergerakan bintang lima. *Ulasan Ilmu Politik Swiss* 23(4): 354–376.
- Kane JV and Barabas J (2019) Tidak ada salahnya memeriksa: menggunakan pemeriksaan manipulasi faktual untuk menilai perhatian dalam eksperimen. *Jurnal Ilmu Politik Amerika* 63(1): 234–249.
- Kriesi H (2014) Tantangan Kerakyatan. *Politik Eropa Barat* 37(2): 361–378. Legorano G dan Mesco M (2017) “Badai Populis Mengaduk di Italia.” *Wall Street Journal* (12 Mei 2017). <https://www.wsj.com/articles/a-populisstorm-stirs-in-italy-1494596762>. (Diakses 27 Januari 2022).
- Loew N and Faas T (2019) Antara ideologi tipis dan tuan rumah: bagaimana sikap populis berinteraksi dengan preferensi kebijakan dalam membentuk perilaku pemilih. *Representasi* 55(4): 493–511.
- Lucassen G dan Lubbers M (2012) Siapa takut apa? Menjelaskan preferensi sayap kanan jauh di Eropa dengan membedakan persepsi budaya dan ancaman etnis ekonomi. *Studi Politik Komparatif* 45(5): 547–574.

- Mair P (2002) *Demokrasi Kerakyatan vs Demokrasi Partai*. Dalam: *Democracies dan Tantangan Kerakyatan*. London, Inggris, Inggris: Palgrave Macmillan, hlm. 81–98. (diakses 19 Februari 2022)
- Mansbridge J dan Macedo S (2019) *Populisme dan teori demokrasi*. *Tinjauan Tahunan Hukum dan Ilmu Sosial* 15: 59–77.
- Maret L (2017) *Populisme kiri dan kanan dibandingkan: Kasus Inggris*. *Jurnal Politik dan Hubungan Internasional Inggris* 19(2): 282– 303.
- Marcos-Marne H (2020) *Kisah populisme? Penentu pemungutan suara untuk partai populis sayap kiri di Spanyol*. *Ilmu Politik* 69(4): 1053–1071.
- Mudde C (2017) *Populisme: Pendekatan ideasional*. Di dalam: Kaltwasser CR, Taggart PA, Espejo PO, dkk. (eds) Bab. 2 dalam *Buku Pegangan Populisme Oxford*.
- Mudde C dan Rovira Kaltwasser C (2017) *Populisme: Pengantar yang Sangat Singkat*. Oxford: Oxford University Press.
- Müller WC (2004) *Pemilihan parlementer di Austria*. *Studi Pemilu* 23(2): 346– 353.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379403000817>
- Norris P dan Inglehart R (2019) *Reaksi Budaya: Trump, Brexit, dan Populisme Otoritarian*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oliver JE and Rahn WM (2016) *Bangkitnya trumpenvolk: Populisme dalam pemilu 2016*. *ANNALS Akademi Ilmu Politik dan Sosial Amerika* 667(1): 189–6206.
- Ostiguy P (2017) *Populisme: pendekatan sosial budaya*. Dalam: *The Oxford Handbook of Populism* Cristobal Rovira Kaltwasser, Paul
- A. Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy. Cambridge: Oxford University Press.
- Rico G dan Anduiza E (2019) *Korelasi ekonomi sikap populis*:

- analisis sembilan negara Eropa setelah resesi besar. *Acta Politica* 54(3): 371–397.
- Rodrik D (2018) Populisme dan ekonomi globalisasi. *Jurnal kebijakan bisnis internasional* 1(1–2): 12–33.
- Rooduijn M, Van Kessel S, Froio C, dkk. (2019) *The PopuList: Tinjauan Partai Populis, Kanan Jauh, Kiri Jauh, dan Eurosceptic di Eropa*. www.popu-list.org Silva BC, Andreadis I, Anduiza E, dkk. (2018) Survei opini publik: skala baru. Dalam: KA Hawkins dan RE Carlin (eds), *Pendekatan Ideasional terhadap Populisme*. Routledge, hlm. 150–177. Levente Littvay, dan Cristóbal Rovira Kaltwasser.
- Silva C, Bruno, Jungkunz S, dkk. (2020) Perbandingan empiris tujuh skala sikap populis. *Kuartal Riset Politik* 73(2): 409–424.
- Tsatsanis E, Andreadis I and Teperoglou E (2018) Populisme dari bawah: korelasi sosioekonomi dan ideologis dari sikap massa di Yunani. *Masyarakat dan Politik Eropa Selatan* 23(4): 429–450.
- Van Hauwaert, Steven M and Van Kessel S (2018) Melampaui protes dan ketidakpuasan: analisis lintas negara tentang pengaruh sikap populis dan posisi isu terhadap dukungan partai populis. *Jurnal Penelitian Politik Eropa* 57(1): 68–92.
- Weisskircher M“es (2020) Kekuatan AfD sayap kanan di Jerman timur: Perpecahan timur-barat dan banyak penyebab berada di belakang ”Populisme. *Kuartalan Politik* 91(3): 614–622.
- Weyland K (2021) Populisme sebagai strategi Politik: keunggulan pendekatan yang bertahan lama dan meningkat. *Ilmu Politik* 69(2): 185–189.
- Wuttke A, Schimpf C and Schoen H (2020) Ketika keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya: pada konseptualisasi dan pengukuran

sikap populis dan konstruksi multidimensi lainnya.
Ulasan Ilmu Politik Amerika 114(2): 356–374.

Zulianello M (2020) Varietas partai populis dan sistem kepartaian di Eropa: dari yang canggih hingga penerapan skema klasifikasi baru hingga 66 partai di 33 negara. Pemerintah dan Oposisi 55(2): 327–347.

Dr. Nursapia Harahap, MA

Buku ini mengkaji tentang komunikasi politik dan relasi antara legislatif, eksekutif dan lembaga agama dalam peningkatan pembangunan keagamaan. Pembahasan dalam buku ini merupakan kajian praktis yang terjadi di kalangan eksekutif, legislative dalam menyikapi kebutuhan Lembaga agama. Disamping itu juga di bahas masalah komunikasi politik dalam pandangan Islam serta teori komunikasi yang berkaitan dengan relasi politik dan keagamaan serta hasil-hasil penelitian yang di kutip dari jurnal-jurnal bereputasi internasional dan nasional



Penerbit
CV. Dalni Bintang
Jl. Cempaka Petakur Atas
Kec. Ujungbatu, Suka Damai
Kab.Rokan Hulu, Riau
HP.085207745513
Email:dalnibintang20@gmail.com



ISBN 978-623-88583-3-0



9 786238 858330